

Pemerintah Provinsi Kalsel Siapkan Rp 11 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Kabupaten Balangan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/07/pemerintah-provinsi-kalsel-siapkan-rp-11-miliar-untuk-perbaikan-jalan-di-kabupaten-balangan>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan anggaran perbaikan sejumlah jalan di wilayah Kabupaten Kabupaten Balangan.

Perbaikan yang dimaksud, yakni ruas jalan Lampihong menuju Paringin dan Paringin menuju Halong.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, menyebut, perbaikan dilakukan dalam dua paket. Anggaran totalnya mencapai Rp 11.547.040.000.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel Ahmad Solhan di Banjarbaru, Jumat, menyampaikan, ada dua paket pekerjaan jalan provinsi di Balangan tersebut pada tahun ini.

Rehabilitasi jalan Lampihong-Paringin, Pemprov Kalsel menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 2.773.520.000.

Saat ini sudah dalam proses kontrak yang dimenangkan oleh PT Cahaya Sambang Sejahtera dengan nilai sebesar Rp 2.636.444.800.

Sedangkan untuk Jalan Paringin-Halong, pagu anggarannya mencapai Rp 8.773.520.000 dan kini dalam persiapan lelang atau purchase e-katalog.

Sesuai instruksi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, perbaikan jalan di daerah perbatasan Kalsel dan Kaltim tersebut dilakukan dengan rehabilitasi pada ruas Jalan Lampihong-Paringin dan perbaikan Jalan Paringin-Halong.

Solhan menjelaskan, Pemprov Kalsel selalu mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Balangan.

Sehingga, jelas bahwa anggapan Pemprov Kalsel tidak mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan provinsi di kabupaten tersebut seperti yang disampaikan Bupati Balangan itu tidak mendasar.

"Setiap tahun Dinas PUPR Provinsi selalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Balangan demikian juga dengan DPRD setempat, ini menunjukkan sudah sinkron dalam pengawasan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan di sana," papar Solhan.

Ia juga tidak memungkiri jalan provinsi selama ini sangat membantu masyarakat, khususnya Kabupaten Balangan, termasuk menjadi lalu lintas angkutan tambang dan angkutan berat yang melintas di jalan provinsi.

Tapi untuk menjaga pemeliharaan jalan tersebut, alangkah eloknya jika tidak selalu diserahkan sepenuhnya ke Pemprov Kalsel saja, namun juga Kabupaten Balangan dan Balai Jalan Nasional ikut andil sehingga bisa sama-sama menjaga dan mengawasi jalan provinsi ini.

"Sebanyak dana yang dianggarkan untuk pemeliharaan jalan provinsi, tapi tidak kita jaga dan awasi bersama sama, maka akan sangat sia-sia yang selama ini Pemprov Kalsel melakukan pemeliharaan," terang Solhan.

Solhan mengungkapkan, sebagaimana komitmen dan arahan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, perbaikan-perbaikan jalan provinsi di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel menjadi perhatian.

"Tentunya akan dilakukan secara bergantian dan bertahap," paparnya.

Solhan juga menyampaikan, upaya Pemprov Kalsel dalam perbaikan jalan milik provinsi ini pun sebagaimana visi Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara, yang salah satu misinya adalah Memperkuat sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.

Selain itu, apabila infrastruktur jalan baik, tentu sebagaimana Misi Kalsel Maju, nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

"Kita berharap, upaya-upaya perbaikan ruas jalan yang dilakukan Pemprov Kalsel ini akan memudahkan akses transportasi, memudahkan pergerakan lalu lintas angkutan barang kebutuhan yang ujungnya tentu untuk kesejahteraan warga Banua," terang Solhan.

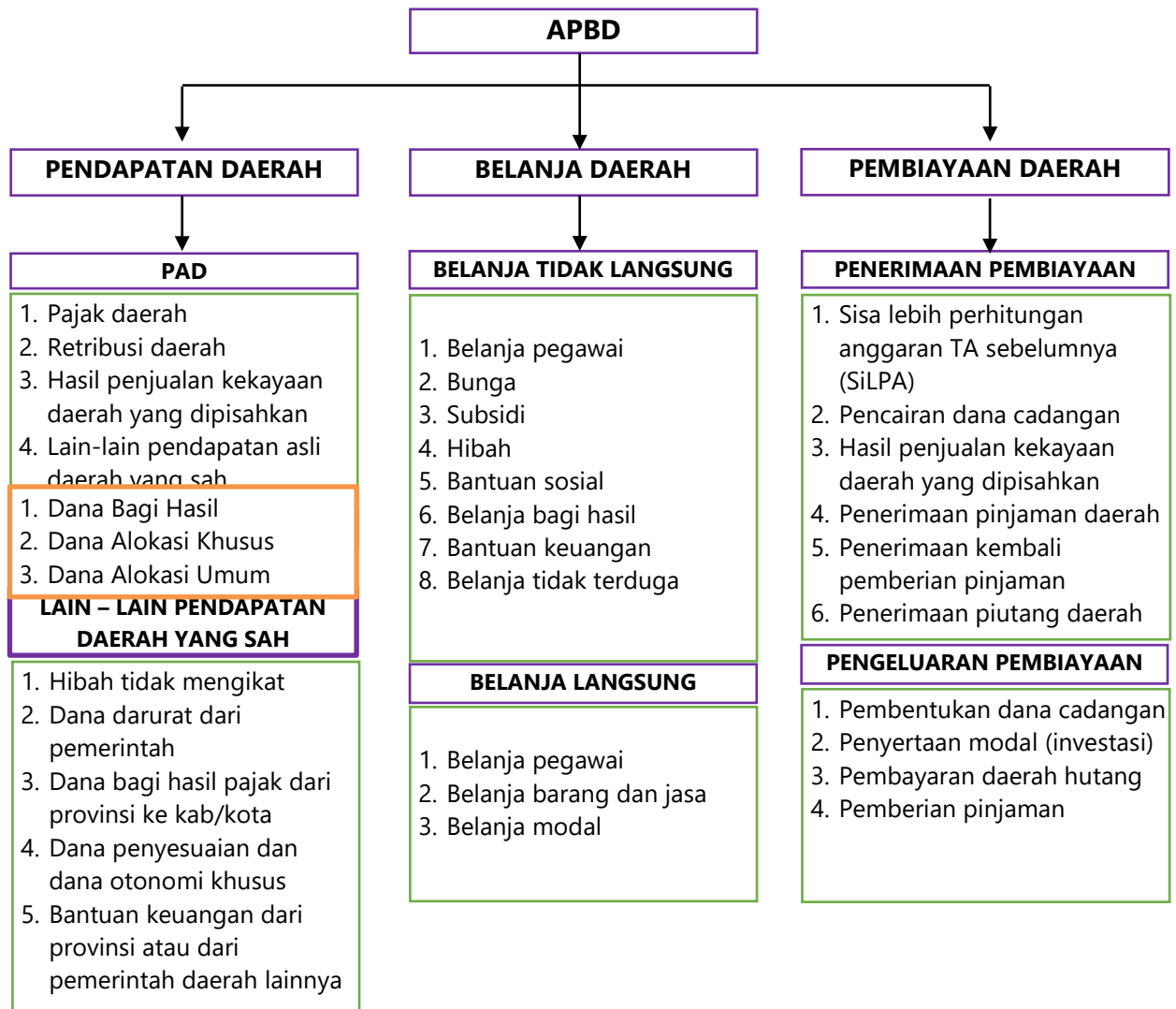
Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/07/pemerintah-provinsi-kalsel-siapkan-rp-11-miliar-untuk-perbaikan-jalan-di-kabupaten-balangan>, 7 April 2023.

2. <https://apahabar.com/post/pemprov-kalsel-alokasikan-rp115-miliar-untuk-perbaiki-jalan-di-balangan-257uxjhp>, 7 April 2023.
3. <https://kalsel.antaranews.com/berita/367083/pemprov-kalsel-alokasikan-rp115-miliar-untuk-perbaiki-jalan-di-balangan>, 7 April 2023.

Catatan:

🗺 Struktur APBD



🗺 Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)